

Inovasi Pengembangan Sektor Pertanian melalui Penerapan Aplikasi Among Tani di Kota Batu

Dwi Rahayu¹, Mahera Maharani², Muhammad Kamil³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Muhammadiyah Malang
Email: rahayudwi005@gmail.com¹; maheramaharanicantik@gmail.com²; kamil@umm.ac.id³

ABSTRACT

With regional autonomy organized, innovation becomes a necessity in the context of accelerating the economy of a region. One of the regional innovations currently being developed in Indonesia is the concept of a smart city or smart city. Batu City is one of the cities that is implementing this concept. As a city that is dubbed as an Agropolitan City, besides having agricultural potential, a sector that is experiencing threats due to various existing problems. The Among Tani application is a breakthrough in the agricultural sector in Batu City as a form of existing agricultural problems and as an embodiment of the concept of a smart city that is being implemented. This research was conducted to implement the Among Tani application and its economic impact in Batu City. The purpose of this research is to analyze (1) the implementation of the Among Farmers in Batu City and (2) the economic impact of the implementation of the Among Farmers on the agricultural sector in Batu City. Monitoring was carried out by the Batu City Communication and Information Office and the Batu City Agriculture Office, and the results obtained until 2018 were that the predetermined indicator indicators had not been met. Meanwhile, the economic impact due to the application of the Among Tani Application includes minimizing crop failure; market expansion; and time and cost costs

Keywords : *Innovation, Public Service, Among Tani, Smart City.*

I. PENDAHULUAN

E-government merupakan penerapan serangkaian proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memungkinkan kelancaran informasi lintas program dan sektor pemerintah, tujuannya agar pemerintah menjadi lebih tanggap dalam memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat (Rubel, 2013). Kesuksesan penerapan e-government membutuhkan perubahan yang fundamental mulai dari cara kerja pemerintahan sampai bagaimana pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerintah Kota Batu juga mulai menerapkan e-government untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan melakukan studi kasus di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu. Penilaian dilakukan menggunakan kerangka kerja Pemingkatan e-government Indonesia (PeGI) yang fokus pada dimensi kebijakan dan dimensi perencanaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil analisis, penerapan e-government pada dimensi kebijakan di Dinas Kominfo berada pada kategori baik, Bapelitbangda berada pada kategori sangat kurang dan Dinas Pertanian berada pada kategori sangat kurang. Sedangkan pada dimensi perencanaan, Dinas Kominfo berada pada kategori kurang, Bapelitbangda berada pada kategori kurang dan Dinas Pertanian berada pada kategori kurang. Dari hasil penelitian tersebut kemudian

disusun rekomendasi perbaikan layanan e-government untuk mencapai kondisi pelaksanaan dengan kategori sangat baik berdasarkan kerangka kerja PeGI. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government dalam lingkup Struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kota Batu, diperlukan penilaian dan analisis bagaimana penerapan teknologi informasi telah dilakukan. Penilaian dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas kominfo) Kota Batu, Bapelitbangda Kota Batu dan Dinas Pertanian Kota Batu. Dinas Kominfo dipilih karena dinas ini sudah seharusnya menjadi leader section dalam penerapan smart city bagi dinas dinas lain di Kota Batu. Sedangkan Dinas Pertanian dipilih karena sesuai dengan visi dan misi Kota Batu untuk memajukan sektor pertanian sebagai sentra pariwisata internasional, tentunya e-government yang baik akan menunjang pencapaian visi tersebut dan Bapelitbangda dipilih karena Badan ini bertugas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan penerapan e-government di Kota Batu. Kota Batu menerapkan konsep smart city dalam program pembangunannya sejak tahun 2017, yaitu dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) No.78 tahun 2017, yang berisi Master Plan Smart City Kota Batu. Diterapkannya smart city di Kota Batu bertujuan untuk mengelola sumber daya alam, pemberian informasi yang tepat, efisiensi operasi perkotaan, daya saing ekonomi, peningkatan jasa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu lainnya untuk sepanjang generasi sekarang maupun selanjutnya. Penerapan konsep smart city di Kota Batu terlihat dari terbentuknya beberapa smart apps yang dapat diakses secara online yang mana merupakan ciri



dari pengguna TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Aplikasi- aplikasi tersebut yaitu: 1) Among Tani, merupakan aplikasi yang khusus mengatur bidang pertanian dengan cara memajang hasil-hasil dan harga dari produksi pertanian Kota Batu secara online, selain itu pengguna aplikasi ini dapat berupa penjual, pembeli, dan ahli tani yang bertugas memberikan informasi mengenai pertanian; 2) Among Warga, adalah aplikasi yang menjadi sarana masyarakat Kota Batu dalam memberikan aspirasinya kepada pemerintah Kota Batu mengenai kejadian di kota, yang mana akan segera ditangani oleh dinas yang terkait; 3) Among Kota, merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai berita terbaru dari Kota Batu, selain itu memberitahukan pembaca mengenai event, tempat wisata, rute kota, kontak darurat, dan lain-lain yang mana akan sangat berguna bagi wisatawan (Pemerintah Kota Batu, 2017).

Bidang pertanian menjadi fokus pertama dari Pemerintah Kota Batu dalam usahanya untuk mendirikan smart city. Selama ini, masalahnya terletak pada rantai perdagangan pertanian diantara petani serta tengkulak. Petani merasa dirugikan karena tengkulak membeli hasil panen atau hasil pertanian dari para petani dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, para petani tersebut tidak bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal serta mengarah pada tingkat kemakmuran para petani tersebut. Karena bagaimana mungkin mereka mendapatkan hidup yang layak jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi akibat dari aksi para tengkulak.

Selain itu, fokus pada bidang pertanian ini juga mengingat Kota Batu yang memiliki potensi di bidang tersebut. Kota ini ditopang dengan keadaan iklim yang dingin serta terletak di daerah yang tinggi dari permukaan laut. Kedua hal tersebut memungkinkan Kota Batu memiliki tanah yang subur serta produktif karena banyak komoditas panen dapat ditanam disana. Pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian yang utama disana sehingga banyak warga yang bekerja serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Batu pun menginisiasikan dengan adanya sebuah platform / wadah yang mana dapat mengakomodasi serta mempertemukan para petani dengan para pembeli secara langsung tanpa adanya pihak lain. Platform tersebut berwujud sebagai aplikasi yang dapat diunduh via smartphone yang berdampak pada tingginya aksesibilitas baik dari pihak petani maupun pihak pembeli. Aplikasi ini bernama "Among Tani" sebagai wujud dari implementasi dari konsep smart city. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini ialah untuk memutus rantai perdagangan antara petani dengan tengkulak yang menyebabkan ketidakadilan serta kesenjangan. Ini seperti forum jual beli hasil pertanian secara daring diantara penjual dengan pembeli.

Untuk mewujudkan penjualan yang total dan sesuai dengan standar yang diminta oleh smart city, disini kota Batu mewujudkan suatu aplikasi, yang mana fungsi dari aplikasi ini ialah untuk membantu para petani dan pemilik kebun untuk memasarkan hasil jualannya online. Aplikasi ini disebut dengan aplikasi "Among Tani". Berikut di atas adalah gambar penampakan dari aplikasi Among Tani yang dapat diunduh di Google Playstore. Gambar yang ada di dalam foto yang ada di aplikasi Among Tani ini cukup akurat. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga dicantumkan harga yang rinci dan detail, jadi pelanggan atau calon pembeli dapat memilah-milah sesuai harga yang sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Namun kesusahan dan tantangan ini di satu sisi terletak kepada pengguna, terutama para petani yang mungkin sudah berusia cukup lanjut, atau memang mereka yang tidak menguasai penggunaan smartphone atau memilih untuk tidak menggunakannya. Memang dapat dikatakan bahwa penggunaan smartphon, terutama bagi kaum lansia (dalam hal petani), dapat cukup membingungkan sehingga banyak juga dari mereka yang meskipun mengetahui manfaat yang cukup besar dari aplikasi Among Tani, namun memilih untuk tidak menggunakannya (Noor, 2020). Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah kota Batu, terutama dinas pertanian, untuk mendorong petani-petani yang berasal dari generasi muda, yang masih memiliki usia produktif, untuk dapat menggunakan aplikasi Among Tani ini untuk menjual bahan pertanian atau perkebunan yang mereka miliki. Selain itu juga, mungkin diharapkan agar para petani muda ini menggandeng para petani lanjut usia yang mungkin ingin menggunakan aplikasi Among Tani, namun belum menguasai cara penggunaannya yang benar.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendasarkan pada sejumlah literatur baik itu riset kepustakaan dan riset lapangan, yang sifatnya primer maupun sekunder. Selain itu juga peneliti tidak perlu untuk melakukan penelitian lapangan dan bertemu dengan informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik systematic literature review, dimana peneliti melakukan proses identifikasi, penilaian, dan interpretasi sejumlah data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian. Dengan demikian, secara garis besar sumber data yang peneliti gunakan dalam mengembangkan penelitian ini



diantaranya adalah sejumlah buku teks, artikel, dan jurnal dengan skala nasional dan internasional serta laman websites, berita elektronik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan ensiklopedia.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Smart City Di Indonesia

Di Indonesia, untuk melaksanakan Smart City membutuhkan dukungan yang kuat setidaknya dari empat pihak, yaitu Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; mitra industri dan teknologi sebagai penyedia solusi infrastruktur hardware, software dan komunikasi; Mitra media sebagai penyedia konten, portal dan promosi; Asosiasi / Komunitas / akademisi / konsultan sebagai penyedia solusi aplikatif dari setiap masalah yang ditemukan selama implementasi. Pertama dengan adanya konsep akuntabilitas, akuntabilitas merupakan prinsip dasar organisasi yang berlaku pada setiap jenjang / unit organisasi sebagai kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala. akuntabilitas publik merupakan kewajiban amanah (agen) untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsip) yang berhak dan berwenang untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Akuntabilitas kepada organisasi pemerintahan khususnya tanggung jawab kepada masyarakat sangat penting, karena organisasi pemerintahan pada dasarnya adalah lembaga yang berorientasi pada publik / masyarakat. Indikator inilah yang menjadikan peran generasi milenial sebagai digital talent perumus global open government dan smart city untuk merumuskan dan menumbuhkan akuntabilitas dan keterbukaan publik sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, artinya sebagai bagian dari prinsip open governance. Implikasinya, sekarang keduanya menjadi diskusi yang hidup dan saling bertukar, penerapannya pada perencanaan daerah yang partisipatif, implementasi dan pola pertanggungjawaban sebagai konsekuensi logisnya. Konsep akuntabilitas di Indonesia bukanlah hal yang baru, hampir semua instansi dan lembaga pemerintah menekankan pada konsep akuntabilitas terutama dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digembargemborkan kembali pada awal era reformasi tahun 1998. Dampaknya, birokrasi yang lemah dan memicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan ketatanegaraan di Indonesia. Prinsip kebijakan akuntabilitas dan transparansi menyadari bahwa pemerintahan terbuka global dan kota pintar

diubah menjadi hasil kebijakan melalui penggunaan katalisator kebijakan. Teori perubahan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan konteks pemerintahan. Prinsip dari kebijakan tersebut adalah keterlibatan publik dalam akuntabilitas-transparansi. Sedangkan katalisator kebijakan antara lain manajemen perubahan-inovasi. Dan dari prinsip perubahan kebijakan global open government dan smart city melalui katalisator kebijakan menghasilkan kebijakan jangka menengah, yaitu: kualitas pelayanan publik. Hal tersebut juga menghasilkan kebijakan jangka panjang yaitu: kualitas demokrasi, pertumbuhan inklusif, kepercayaan kepada pemerintah dan supremasi hukum (Yuniarti, 2019).

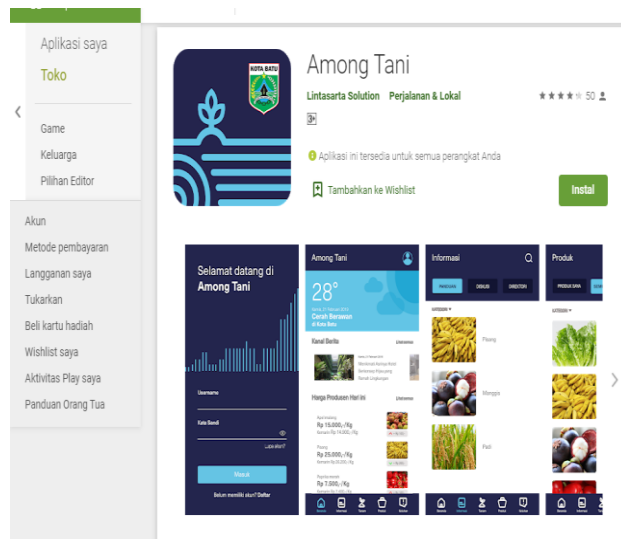
Implementasi Smart City Di Kota Batu (Aplikasi Among Tani)

Pengembangan 5.0 adalah pemanfaatan teknologi yang telah berkembang untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Kota Batu secara efisien dan fleksibel, dan tentunya juga merupakan salah satu cita-cita dan indikator yang harus dicapai bagi semua kota untuk mendapatkan julukan sebagai kota pintar, atau yang disebut juga dengan smart city. Pencapaian ini berdasarkan data terintegrasi. Pemanfaatan data ini bersumber dari teknologi informasi digital. Teknologi komunikasi berupa rangkaian mahadata (big data) yang sudah tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan informasi pusat data yang terintegrasi dalam pengelolaan wilayah. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah tujuan dalam memanfaatkan teknologi data besar dalam penggunaan anggaran. Kondisi itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalisme serta asas akuntabilitas. Tuntutan masyarakat saat ini adalah adanya keuangan daerah akuntabilitas. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk persyaratan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas, berupa keterbukaan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap, dimana laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak internal



pemerintah daerah, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja (SAKT, 2020).

Sejalan dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan pemerintahan terbuka global dan kota pintar, Pemerintah Kota Batu memfokuskan upaya luar biasa untuk menyelesaikan masalah sumber daya, struktur, tata kelola dan jaringan industri, serta infrastruktur. Dunia maya selalu sejalan dengan peningkatan infrastruktur, organisasi, dan sumber daya manusia. Pencapaian ini memupuk dua syarat penting akuntabilitas dan transparansi. Pertama dengan adanya konsep Akuntabilitas, akuntabilitas merupakan prinsip dasar organisasi yang berlaku pada setiap jenjang / unit organisasi sebagai kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban atas laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas publik yang dinyatakan adalah kewajiban pemegang mandat (agen) untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanat (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakannya secara akuntabel (SAKT, 2020).



Gambar 1. Aplikasi Among Tani

Untuk mewujudkan penjualan yang total dan sesuai dengan standar yang diminta oleh smart city, disini kota Batu mewujudkan suatu aplikasi, yang mana fungsi dari aplikasi ini ialah untuk membantu para petani dan pemilik kebun untuk memasarkan hasil jualannya online. Aplikasi ini disebut dengan aplikasi “Among Tani”. Berikut di atas adalah gambar penampakan dari aplikasi Among Tani yang dapat diunduh di Google Playstore. Gambar yang ada di dalam foto yang ada di

aplikasi Among Tani ini cukup akurat. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga dicantumkan harga yang rinci dan detail, jadi pelanggan atau calon pembeli dapat memilah-milah sesuai harga yang sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Namun kesusahan dan tantangan ini di satu sisi terletak kepada pengguna, terutama para petani yang mungkin sudah berusia cukup lanjut, atau memang mereka yang tidak menguasai penggunaan smartphone atau memilih untuk tidak menggunakannya. Memang dapat dikatakan bahwa penggunaan smartphon, terutama bagi kaum lansia (dalam hal petani), dapat cukup membingungkan sehingga banyak juga dari mereka yang meskipun mengetahui manfaat yang cukup besar dari aplikasi Among Tani, namun memilih untuk tidak menggunakannya (Noor, 2020). Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah kota Batu, terutama dinas pertanian, untuk mendorong petani-petani yang berasal dari generasi muda, yang masih memiliki usia produktif, untuk dapat menggunakan aplikasi Among Tani ini untuk menjual bahan pertanian atau perkebunan yang mereka miliki. Selain itu juga, mungkin diharapkan agar para petani muda ini menggandeng para petani lanjut usia yang mungkin ingin menggunakan aplikasi Among Tani, namun belum menguasai cara penggunaannya yang benar (Annissa, 2020).

Literatur Review dari program Aplikasi Among Tani ini ada yaitu, inovasi, karakteristik inovasi, dan pelayanan publik. Berikut penjelasan dari masing-masing poin tersebut.

Inovasi

Inovasi berasal dari bahasa Latin yang berarti berubah menjadi sesuatu yang baru. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara barang-barang buatan manusia, yang diamati dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Inovasi adalah perubahan yang direncanakan guna memperbaiki segala segala praktik-praktik. Dengan demikian inovasi dapat dikatakan sebagai faktor penyebab perubahan. Perubahan dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua bidang yang bersangkutan. Menurut Damapur inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Pengertian inovasi menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.2 Sedangkan menurut para ahli inovasi adalah sebagai berikut: a). Gopalakrishnan dan Damapur mengungkapkan, inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru,



apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, produk, metode atau bentuk pelayanan. b). Everett M. Rogers, mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. c). Schumpeter, menyatakan adanya inovasi dapat menambah nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi organisasi tapi juga stakeholder dan masyarakat. d). Rosenfeld, inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru, atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. E). Stephen Robbins, mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai suatu produk atau proses dan jasa.

Pelayanan Publik

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Pada dasarnya, pelayanan merupakan kegiatan yang merupakan proses. Biasanya pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain.

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelayanan publik terdapat beberapa prinsip dalam mendukung jalannya pelayanan antara lain, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tercapainya pemerintahan terbuka global 5.0 dan kota pintar untuk Kota Batu memaknai hubungan antar warga dan administrasi kebijakan terbuka yang bertanggung jawab atas kepemilikan bersama, artinya suasana peningkatan keterlibatan warga melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sinergi diwujudkan dalam tiga upaya, yaitu pelaksanaan kebijakan, organisasi pemerintahan, dan kemampuan koordinasi. Upaya ini menciptakan penggunaan teknologi yang efisien dan fleksibel. Society 5.0 menjadikan peran generasi milenial untuk memanfaatkan teknologi yang telah berkembang, artinya teknologi digunakan dengan mudah dan terhubung satu sama lain. Tujuannya untuk mendorong konsultasi dan keterlibatan publik. Hasilnya mendapatkan ide dan masukan baru dari warga tentang kebijakan pelayanan, sehingga meningkatkan kualitas pemerintahan dan kepatuhan warga terhadap pemerintah. Selain dari segi keterbukaan dan akuntabilitas, salah satu implementasi nyata juga dari kota Batu untuk mewujudkan kotanya sebagai kota yang pintar dalam hal agrikultur, pemerintah kota Batu meluncurkan aplikasi Among Tani, yang mana melalui aplikasi ini tentunya diharapkan dapat membantu para petani memaksimalkan penjualannya dan juga dapat meningkatkan taraf ekonomi kota Batu itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, K. (2020). novasi Aplikasi Among Tani Dalam Meningkatkan Pelayanan Pertanian di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Avisha, A., Charina, A., Noor, T. I., & Mukti, G. W. (2019). Crowdfunding sebagai akses alternatif permodalan berbasis teknologi digital pada kegiatan pertanian (studi kasus di PT crowde membangun bangsa). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(1), 1-22.
- Hutama, I. A. W., Djunaedi, A., & Loka, T. (2019). Pemetaan Kategori Dimensi Smart City Berdasarkan Ragam Inovasi Aplikasi Dan Situs Web Manajemen Perkotaan Di Indonesia. *Volume*, 21, 445-458.
- Khairi, N. F., & Adibrata, J. A. Agro-Based Smart City Kota Batu: Implementasi Dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 55-62.
- Maryam, S., & Hubeis, M. (2009). Efektivitas Penyebaran Informasi di Bidang Pertanian melalui Perpustakaan Digital (Kasus Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian). *Jurnal KMP (Jurnal*



- Komunikasi Pembangunan), 7(1).
- Noor, L. F. (2020). Analisis Persepsi Petani Kelompok Tani Bagus Desa Junrejo Kota Batu Terhadap Aplikasi Among Tani.
- Prayoga, K. (2015). Aplikasi Digital Pertanian: Geliat Pemberdayaan Petani di Era Virtual. *Sumber*, 26, 57-03.
- Prayoga, K. (2018). Dampak Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(1), 46-59.
- Puspitasari, R. D. (2019). Pertanian Berkelanjutan Berbasis Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 3(1), 26-28.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-19.
- SAKT, P. (2020). Implementasi Program Smart City Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Kota Berjaya Pemerintah Kota Batu.
- Setiawan, A., & Iqbal, G. T. (2019). Inovasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanian Melalui Aplikasi Among Tani di Kota Batu. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Wibowo, E. T. Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204-228.
- Wole, B. D., Sasmito, C., & Purwaningsih, A. (2021). Analisis Kebijakan Smart City Pada Among Tani untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 3(1), 58-67.
- Yuniarti, E. (2019). Smart green open space outlook: pattern identification (case study: Yogyakarta City and Batu City). *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 227.

